

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bagian yang sangat strategis dalam sebuah organisasi, baik pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya laporan keuangan kita dapat mengetahui gambaran sebuah organisasi. Pentingnya laporan keuangan ini menjadikan setiap organisasi harus mampu menyajikan laporan keuangan yang valid dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat menunjukkan kondisi organisasi yang sebenarnya. Dalam kaitan laporan keuangan yang akuntabel tentu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu penyajian sebuah laporan keuangan yang baik dan sesuai.

Pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah membuat sebuah sistem terintegrasi untuk seluruh satker pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga, yakni Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat disebutkan bahwa Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akruaI. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akruaI dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan

basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure*. Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan siklus anggaran. Sistem akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) digunakan sampai dengan tahun anggaran 2014. Mulai tahun 2015 basis akrual diterapkan pada Pemerintah Pusat untuk menghasilkan laporan keuangan. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga. Sistem ini diterapkan secara paralel dengan implementasi sistem aplikasi keuangan terintegrasi sesuai dengan pentahapannya.

Hidayatullah (2010) mengatakan pengadopsian sistem akrual tidak hanya bertujuan standar dan format penyajian laporan keuangan belaka, tetapi juga berdampak pada berubahnya sistem penyusunan anggaran. Di samping itu, pengadopsian sistem akuntansi akrual mau tidak mau akan mempengaruhi sistem dan pengukuran kinerja pemerintah. Dengan kata lain, akrualisasi sistem

akuntansi pemerintahan selain merubah format akuntabilitas keuangan, juga akan berdampak pada kebijakan fiskal dan kinerja pemerintah di masa yang akan datang.

Implementasi akuntansi berbasis akrual tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012), Pada dasarnya hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*). Sedangkan jika ada basis akuntansi lain seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi. Dasar akuntansi merupakan metode-metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam menentukan kapan dan dimana mencatat transaksi ekonomi. Metode pencatatan tersebut berbeda pada masalah waktu (*timing*) kapan transaksi ekonomi ke dalam akun. Dalam akuntansi basis kas, transaksi tidak diakui/dicatat sampai transaksi secara kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Apabila transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi.

Penggunaan basis akrual (*accrual basis*), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Menurut basis akrual pendapatan dicatat ketika pendapatan tersebut diperoleh, meskipun apabila pendapatan tersebut tidak diterima secara kas sampai jauh di masa mendatang. Begitu pula beban, beban dicatat ketika beban tersebut terjadi, meskipun sebenarnya beban tersebut tidak dibayarkan sampai jauh di masa mendatang (Abdul Halim dan Syam Kusufi, 2012).

Keinginan pemerintah untuk segera mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2015 menjadikan pemerintah harus bergerak aktif dalam penerapan kebijakan basis akrual tersebut ke seluruh Kementerian/Lembaga serta seluruh satuan kerja di bawahnya.

Implementasi akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Departemen atau Lembaga non Departemen.

Penelitian terhadap implementasi Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI dalam pemerintahan sudah pernah dilakukan, diantaranya oleh Permana (2016) meneliti tentang Penerapan Aplikasi SAIBA untuk Penyusunan Laporan Keuangan. Hasil penelitian menyatakan Aplikasi SAIBA sangat membantu dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama meskipun masih banyak diperlukan penyempurnaan terutama yang berhubungan dengan kestabilan dikarekan aplikasi ini belum lama diterapkan.

Risniansih (2016) meneliti tentang Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa terdapat perbedaan kendala pada setiap daerah, antara lain penyusunan standar yang tidak independen, produk hukum yang saling bertentangan, minimnya dukungan elit pemerintah, kurangnya respon dari Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat, kurangnya staf yang berkualitas, serta kendala reformasi akuntansi pada tingkat pemerintah daerah.

Yunita (2016) meneliti tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintah serta kemampuan SDM dalam memahami sistem untuk menyusun laporan keuangan belum dimiliki oleh setiap satker dan kurangnya

pegawai yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi menjadi sebab terdapatnya pembebanan tugas kepada satker lain.

Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi merupakan kementerian yang membidangi penelitian dan pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. LLDIKTI Wilayah II Palembang merupakan salah satu satuan kerja dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang mendapatkan anggaran belanja dari APBN tentunya memiliki kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja dalam hal ini Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang nantinya akan dikonsolidasi ke tingkat eselon I dengan seluruh satuan kerja di bawah Kemenristekdikti menjadi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Dalam proses implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) pada Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang merupakan induk dari satuan kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II menunjukkan progres yang sangat baik, ini terlihat dari pencapaian laporan keuangan kementerian yang mendapatkan opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Tahun 2015, kemudian meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Tahun 2016, dan kembali mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Tahun 2017. Hal ini menjadi indikasi bahwa dalam Implementasi Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akrual (SAIBA) tersebut terdapat kendala dalam awal penerapannya, akan tetapi semakin terlihat hasil yang lebih baik secara bertahap

Tabel 1.1

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kemenristekdikti Tahun 2015 s.d. 2017

Tahun Pelaporan	Opini BPK
2015	WDP
2016	WTP
2017	WTP

Polemik yang muncul dari implementasi sistem akuntansi yang berbasis akrual yang merupakan transisi dari sistem sebelumnya yang berbasis kas (*cash basis*) sudah pasti akan memunculkan berbagai persoalan yang akan dihadapi, seperti sistem yang saling terintegrasi yang terkadang menimbulkan problem dikarenakan perbedaan persepsi dalam pengakuan transaksi, aplikasi yang seringkali melakukan update dan perubahan-perubahan serta beberapa kendala lain yang tentunya akan berdampak pada kualitas penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LLDIKTI Wilayah II Palembang.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Berdampak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LLDIKTI Wilayah II Palembang ?”

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LLDIKTI Wilayah II Palembang untuk Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta terbatas pada lingkup Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) satuan kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI pada LLDIKTI Wilayah II Palembang berdampak terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu sarana pengaplikasian pengetahuan yang didapat di masa perkuliahan serta menambah pemahaman bagi penulis terhadap persoalan yang

terjadi sesungguhnya, khususnya implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI terhadap laporan keuangan pada satuan kerja di pemerintahan.

2. Bagi LLDIKTI Wilayah II Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap sistem yang telah diterapkan sebagai koreksi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Bagi Pembaca dan Peneliti

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi penulisan selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori sebagai pendukung dalam penelitian yang meliputi definisi sistem, pengertian akuntansi, basis akuntansi, penjelasan mengenai Sistem Akuntansi

Instansi, Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA), kebijakan akuntansi pemerintah, Jenis Laporan Keuangan Pemerintah.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, pembahasan mengenai Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.